

Pembangunan Berkelanjutan sebagai Upaya *Rebound* dari Resesi

Pandemi *Covid-19* telah membawa dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seluruh dunia. Baik negara berkembang hingga negara maju hampir tak dapat menemukan resep jitu untuk menghindarkan resesi menggerogoti perekonomian mereka. Indonesia dapat dikatakan masih cukup beruntung dengan hanya mengalami kontraksi ekonomi pada kuartal III sebesar 3.49 persen, dibandingkan dengan *statement* IMF yang menyebut perekonomian global akan mengalami minus hingga 16.5 persen. Walau begitu, tetap menjadi sebuah keharusan bagi Pemerintah Indonesia untuk meracik strategi agar dapat keluar dari kondisi resesi saat ini. Sebagai negara berkembang, perekonomian Indonesia masih bergantung pada kekayaan alam yang ada. Indonesia memang terkenal memiliki sumber daya alam (SDA) yang luar biasa besar. Modal ini tentu dapat menjadi kunci Indonesia untuk *rebound* dari resesi dengan pemanfaatan SDA tersebut. Pemerintah sebagai *policy maker* berwenang untuk melakukan pengelolaan SDA dan mengambil manfaat darinya. Namun, tidak semua SDA berstatus *renewable resources* yang berarti terdapat macam SDA yang bila dilakukan eksplorasi secara terus menerus akan habis pada kurun waktu tertentu.

Proyeksi Pembangunan Infrastruktur

Sebelum pandemi *Covid-19*, sebenarnya Indonesia sedang mengalami pembangunan infrastruktur secara masif. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai prasyarat roda perekonomian dapat digerakkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pandemi *Covid-19* pembangunan-pembangunan tersebut sempat dihentikan sementara guna membatasi aktivitas pekerja yang dapat menyebabkan penyebaran *Covid-19*. Sempat muncul keraguan publik mengenai kapabilitas pemerintah dalam melanjutkan proyek pembangunan yang ada, terlebih dengan ekonomi yang sedang resesi publik menjadi semakin ragu darimana dana dapat dihimpun selanjutnya. Namun, sinyal positif datang dari pengumuman pendirian *Indonesia Investment Authority* (INA) yang merupakan Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia. INA nantinya mempunyai dua tugas utama. Yakni untuk menangkap peluang investasi di tanah air dan sebagai solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan Pendirian lembaga tersebut, walau tidak dapat memberikan garansi, setidaknya dapat menjadi sentiment positif bagi Indonesia untuk keluar dari masa sulit melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur kedepannya. Bila sesuai rencana, diprediksi bahwa pembangunan infrastruktur akan semakin gencar dijalankan Pemerintah Indonesia. Hal tersebut satu sisi berdampak positif bagi perekonomian, namun di sisi lain material yang diambil dari kekayaan alam Indonesia akan mengancam kelestariannya di masa yang akan datang.

Pemanfaatan dan Ketersediaan Bahan Material

Pasir sebagai salah satu material utama menjadi komoditas buruan seiring meningkatnya intensitas pembangunan infrastruktur. Pasir laut sesuai Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut adalah bahan galian pasir yang terletak di wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Memang dalam kondisi mentah pasir laut tidak dapat dijadikan bahan bangunan, namun setelah melalui proses penetralan garam sulfat, material ini sama saja fungsinya dengan pasir biasa. Aktivitas penambangan pasir laut di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 80-an, dimana saat itu Indonesia menjadi pemasok pasir bagi kepentingan reklamasi Singapura. Aktivitas tersebut dihentikan pada tahun 2006 karena ditilik dari manfaat yang didapat, tidak sebanding dengan kausalitas yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Kepulauan Riau di masa itu. Bahkan dewasa ini, peningkatan intensitas penambangan pasir pun dirasakan oleh para nelayan di Makassar dimana penambangan pasir laut di perairan Spermonde Makassar mendapat perhatian sejumlah LSM nasional yang tergabung dalam koalisi Selamatkan Laut Indonesia. Mereka menyatakan bahwa zona tangkap nelayan yang biasanya disinggahi menjadi miskin ikan, sehingga harus mengeluarkan ongkos yang lebih besar untuk mencari ikan di tempat yang lebih jauh.

Pembangunan Berkelanjutan

Seyogyanya pembangunan infrastruktur di Indonesia yang juga merupakan salah satu pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan UUD 1945, harus diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan hidup, karena setiap sumber daya alam dan lingkungan pada dasarnya memiliki kapasitas daya dukung dan daya tampung yang terbatas.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang penting diperhatikan, dimana pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan sosial diharapkan tidak mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan. Sehingga dalam pemanfaatannya perlu memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan dengan bijaksana. Konsep inilah yang mendasari adanya pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga tujuan utama, yaitu berkelanjutan ekologis (jaminan eksistensi sumber daya alam), berkelanjutan ekonomi (efisiensi ekonomi), dan berkelanjutan sosial (keanekaragaman budaya). Target yang hendak dicapai dituangkan dalam istilah Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs sendiri merupakan lanjutan dari program Millenium Development Goals (MDGs). Program MDGs sendiri diupayakan berhasil pada tahun 2000-2015 yang kemudian dilanjutkan oleh program SDGs hingga tahun 2030. Pembahasan

mengenai program SDGs dilakukan pada tahun 2015 dengan usulan adanya 17 tujuan yang harus tercapai. Tujuan tersebut dituangkan dalam rencana pembangunan (RPJMN dan RPJMD) Pada poin ke-9 dari 17 tujuan yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) menyatakan bahwa ke depan infrastruktur akan diarahkan untuk mengarah pada kualitas, bukan saja kuantitas. Maka menjadi menarik bagaimana *policy maker* harus memperhitungkan secara seksama pembangunan yang berjalan dengan tidak mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam yang ada agar tetap lestari hingga anak cucu nanti.